

PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Panitia Pelaksana dapat menerbitkan buku panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat tahun 2007.

Buku panduan ini dibuat sebagai pedoman bagi para peserta dalam mengikuti RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat seluruh Indonesia tahun 2007, yang berisi antara lain : organisasi persidangan, jadwal acara, tata tertib dan daftar peserta.

RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat ini diselenggarakan dari tanggal 26-28 Nopember 2007 di Hotel CLARION Makassar, dengan harapan semoga RAKORNIS ini dapat terselenggara dengan lancar serta bermanfaat bagi para peserta dan masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan ini Panitia Pelaksana mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan serta sejak dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan Rakornis ini.

Selanjutnya tak lupa pula Panitia menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam Pelaksanaan Rakornis ini banyak terdapat kekurangan.

Demikian disampaikan dan Selamat mengikuti Rakornis.

Makassar, 26 Nopember 2007

**PANITIA
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2007**

TTD

KETUA PANITIA

A. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan-perubahan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan, yakni dari tersentralisir menjadi terdesentralisir. Secara teoritis kondisi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan peran daerah dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah-daerah, karena peran pusat telah bergeser lebih ke fasilitator dan supervisor.

Namun demikian, pada kenyataannya penguatan peran dimaksud tidak atau belum diiringi dengan kesiapan sejumlah prasyarat agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai tujuannya, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi. Beberapa prasyarat seperti kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, peraturan perundang-undangan dan jaringan prasarana atau infrastruktur sebagian besar dalam kondisi tidak atau kurang memadai, sehingga selama beberapa waktu masyarakat harus membayar lebih mahal (*social cost*) dibanding periode sebelum otonomi daerah diberlakukan untuk mendapatkan layanan umum. Memperhatikan beberapa permasalahan dan kendala tersebut diatas kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan-perubahan dimaksud antara lain dengan diterapkannya kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan.

Dalam konteks Transportasi Darat, sejumlah permasalahan dan kendala masih ditemui seperti kebijakan penarikan retribusi terhadap angkutan antar kota dan barang setiap melintas pada wilayah administratif tertentu, lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap muatan lebih, kurangnya komitmen dan aksi bersama terhadap keselamatan jalan, kurangnya pengawasan kelaikan sarana angkutan jalan, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia bidang transportasi darat.

Dengan melalui forum rapat koordinasi teknis bidang perhubungan darat tersebut, akan dibahas permasalahan-permasalahan dan kendala yang masih terjadi dalam penyelenggaraan transportasi darat untuk dapat dicarikan solusinya, serta adanya tukar menukar informasi mengenai model-model penanganan permasalahan penyelenggaraan transportasi darat untuk tingkat nasional, regional dan daerah. Sehingga melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah tindak lanjut guna mewujudkan layanan transportasi darat yang aman, selamat, mudah dijangkau, berdaya saing dan terintegrasi.

B. MAKSUD TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan penyelenggaraan Rakornis adalah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi darat melalui pembinaan teknis secara berkesinambungan terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan, khususnya dalam rangka :

1. Mendapatkan masukan dari pemerintah daerah tentang hal - hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat pada sub sektor transportasi darat.
2. Menemukanali permasalahan-permasalahan di lapangan dan merumuskan langkah tindak lanjut pemecahannya.

C. TEMA

Tema dalam Rakornis tahun 2007 ini berkaitan dengan pokok bahasan yang akan didiskusikan perihal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta *issue-issue* Keselamatan Jalan. Terkait hal tersebut tema yang dicanangkan adalah :

“PEMBERDAYAAN PUSAT DAN DAERAH MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 DALAM RANGKA PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT”

D. PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Waktu dan Tempat

Rakornis dilaksanakan pada tanggal 26-28 Nopember 2007 bertempat di Hotel CLARION, Jalan AP. Pettarani No. 3 Makassar, Sulawesi Selatan. Telpon (0411)833 888, Fax (0411) 833 777.

2. Fasilitas yang disediakan :

- a. Akomodasi bagi peserta;
- b. Fasilitas ruang Sidang;
- c. Perlengkapan untuk peserta berupa tas berisi materi dan alat tulis;
- d. Konsumsi selama Rakornis;
- e. Pelayanan kesehatan ringan;

3. Fasilitas yang tidak ditanggung Panitia :

- a. Biaya penggunaan fax atau telepon;
- b. Permintaan akomodasi, konsumsi dan lain-lain diluar yang telah disediakan Panitia;
- c. Mini Bar, Permintaan Laundry dan fasilitas lain yang tidak termasuk pelayanan hotel;
- d. Kehilangan barang milik hotel (Handuk, Selimut, Bed Cover, Kunci Kamar, Teko dll);

4. Pendaftaran Peserta

Para peserta Rakornis sudah harus melapor kepada panitia :

Hari / Tanggal : Senin, 26 Nopember 2007

Pukul : 13.00-18.00 WITA

Tempat : Hotel CLARION

Jl. AP. Pettarani No.3 Makassar, Sulawesi Selatan

Telp. (0411) 833 888

Fax. (0411) 833 777

5. Pembicara

Pembicara yang akan mengisi acara Rakornis adalah :

- a. Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
- b. Ketua Global Road Safety Partnership Indonesia (GRSPI);
Ir. Giri Suseno Hadi Hardjono
- c. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Hubdat;
Drs. Suroyo Alimoeso
- d. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
(LLASDP) Ditjen Hubdat;
Drs. Ahmad Syukri
- e. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen Hubdat;
DR.Ir. Elly Sinaga, MSc
- f. Direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD) Ditjen Hubdat;
Drs. Suripno, MStr

6. Peserta Rakornis

Peserta Rakornis terdiri dari unsur-unsur:

- a. Ditjen Perhubungan Darat;
- b. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
- c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
- d. BUMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- e. Kapuslitbang Darat;
- f. Ketua STTD;
- g. Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubdat;
- h. Kepala Pusdiklat Perhubungan Darat;
- i. Kepala Balai Transjaya Tegal;
- j. Kepala Balai Diklat Phb. Darat Bali;
- k. Kepala Balai Diklat LLASDP Palembang;
- l. Unit Kerja terkait di lingkungan Dephub.

E. ACARA

Secara garis besar acara yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pembukaan dan Pengarahan oleh Menteri Perhubungan.
2. Pengarahan Umum oleh Dirjen Hubdat.
3. Presentasi dari Dirjen Otda Depdagri, Ketua GRSP Indonesia, Direktur LLAJ Ditjen Hubdat, Direktur LLASDP Ditjen Hubdat, Direktur BSTP Ditjen Hubdat dan Direktur KTD Ditjen Hubdat
4. Sidang Komisi;
5. Sidang Pleno dan Penutupan.

Susunan Acara Rakornis Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dalam lampiran I.

F. TATA TERTIB PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Panitia Pelaksana menerima pendaftaran peserta mulai pukul 13.00 WITA pada Hari Senin tanggal 26 November 2007.
2. Peserta menginap di Hotel Clarion, Makassar Sulawesi Selatan.
3. Hadir 15 menit di ruang sidang sebelum acara dimulai.
4. Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia.
5. Peserta Wajib Berpakaian Dinas Harian lengkap dan menggunakan tanda pengenal yang disediakan Panitia selama kegiatan dan berpakaian batik pada acara pembukaan.
6. Selama kegiatan berlangsung, peserta dilarang meninggalkan ruang Rakornis atau sidang kecuali mendapat ijin dari Panitia.
7. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merokok di ruang Rakornis atau ruang sidang.
8. Memberitahukan kepada Panitia apabila berhalangan hadir.
9. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama Rakornis berlangsung.

G. TATA TERTIB PERSIDANGAN

1. Pembagian Komisi

Jumlah komisi direncanakan dibagi menjadi 3 (tiga), yang terdiri dari:

- a. Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan
- b. Komisi II : Bidang Transportasi Perkotaan
- c. Komisi III : Bidang LLASDP

2. Organisasi Persidangan

a. Organisasi persidangan terdiri dari:

- 1) Ketua Sidang
- 2) Sekretaris
- 3) Anggota
- 4) Nara Sumber
- 5) Notulen
- 6) Perumus

b. Peserta yang telah disusun dalam keanggotaan komisi wajib mentaati keanggotaan tersebut, bagi unit organisasi yang mengirim peserta lebih dari 1 (satu) orang dapat menempatkannya pada komisi yang berbeda.

3. Materi Persidangan

Materi yang akan dibahas dalam Sidang Komisi, meliputi:

- a. Materi persidangan yang disiapkan oleh Panitia ;
- b. Isu-isu menonjol yang sedang berkembang saat ini.

4. Mekanisme Persidangan

- a. Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komisi dengan dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh peserta dalam komisi, serta didampingi oleh Notulen, Tim Materi dan Nara Sumber.
- b. Pimpinan Sidang memaparkan beberapa isu yang akan dibahas dalam setiap komisi untuk mendapatkan tanggapan dari Anggota Komisi.
- c. Dalam pembahasan setiap isu dimintakan tanggapan atau pendapat dari peserta.
- d. Tanggapan oleh para peserta disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di daerahnya masing-masing.
- e. Pembahasan dan tanggapan pada setiap Sidang Komisi dicatat oleh Notulen dan dirumuskan bersama oleh Ketua Sidang dibantu oleh Tim Materi.

- f. Ketua Komisi berkewajiban mengendalikan dan mengarahkan jalannya sidang agar diskusi tidak berkembang menyimpang dari pokok materi bahasan.
- g. Nara Sumber dan Tim Materi membantu memberikan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan materi bahasan dalam memperlancar pembahasan jalannya sidang.
- h. Ketua Komisi berkewajiban membentuk Tim Perumus Komisi.
- i. Hasil perumusan komisi dilaporkan dalam Sidang Pleno yang dibacakan oleh Ketua Komisi atau yang mewakili.
- j. Hasil akhir Sidang Pleno disusun oleh Tim Materi beserta Notulen dan Tim Perumus Komisi.

H. JUMLAH PESERTA DAN UNDANGAN RAKORNIS TAHUN 2007

1. PESERTA

Jumlah peserta yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan Rakornis tahun 2007 direncanakan sebanyak 516 orang, yang terdiri dari:

- a. Dirjen Perhubungan Darat = 1 orang
- b. Sesditjen / Para Direktur di lingkungan
Ditjen Perhubungan Darat = 5 orang
- c. Kapuslitbang Perhubungan Darat = 1 orang
- d. Kapusdiklat Perhubungan Darat = 1 orang
- e. Kepala Pusat Kajian Strategis PJP Dephub = 1 orang
- f. Kepala Dishub/LLAJ Propinsi = 33 orang
- g. Kepala Dinas Perhubungan Kota = 91 orang
- h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten = 349 orang
- i. Direksi BUMN (Damri, ASDP) = 4 orang
- j. Kepala Balai di lingkungan Ditjen Hubdat = 3 orang
- k. Ketua STTD Bekasi = 1 orang
- l. Kepala UPT di lingk Ditjen Hubdat = 4 orang
- m. Pemimpin Cabang PT. ASDP = 12 orang
- n. Para Pejabat Eselon III di lingkungan
Ditjen Perhubungan Darat = 10 orang

2. UNDANGAN

Peserta undangan yang diharapkan hadir dalam Rakornis Tahun 2007 ini terdiri dari Unit Kerja / Instansi di lingkungan Departemen Perhubungan dan Instansi terkait yang mempunyai relevansi langsung dalam upaya peningkatan kinerja keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Undangan terdiri dari:

a. Menteri Perhubungan	=	1 orang
b. Sekjen Departemen Perhubungan	=	1 orang
c. Gubernur Sulawesi Selatan	=	1 orang
d. Irjen Departemen Perhubungan	=	1 orang
e. Dirjen Perhubungan Laut	=	1 orang
f. Dirjen Perhubungan Udara	=	1 orang
g. Kabadan Litbang Dephub	=	1 orang
h. Kabadan Diklat Dephub	=	1 orang
i. Direksi BUMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	=	2 orang
j. Kepala Biro Perencanaan Dephub	=	1 orang
k. Kepala Biro Keuangan Dephub	=	1 orang
l. Kepala Pusdatin Dephub	=	1 orang
m. Direktur Transportasi Bappenas	=	1 orang
n. DPP Organda	=	1 orang
o. Gapasdap	=	1 orang
p. PT. Jasa Raharja	=	1 orang
q. PT. Jasa Raharja Putera	=	1 orang
r. Wartawan	=	10 orang

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**SUSUNAN ACARA
 RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
 TANGGAL 26 s/d 28 NOPEMBER 2007
 HOTEL CLARION MAKASSAR**

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
1.	Senin 26 Nop '07	13.00 -18.00	Registrasi Peserta	Lobby Hotel Clarion Makassar	Bidang Akomodasi
		18.30 – selesai	Pembukaan Rakornis Tarian Selamat Datang Lagu Indonesia Raya Laporan Ketua Panitia Sambutan Selamat Datang oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pengarahan dan Pembukaan Rakornis oleh Menteri Perhubungan Pembacaan Doa Peninjauan Pameran Ramah tamah, Makan malam dan Hiburan	Clarion Convention Hall A - B <i>Pakaian Batik Lengan Panjang</i>	Bidang Acara, Humas, MC

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
	Selasa 27 Nop'07	06.00-07.30	Makan Pagi	Legend Coffee Shop	Bidang Komsumsi
		07.30-08.30	Hymne Perhubungan Pengarahan Dirjen Hubdat Dilanjutkan dengan Tanya Jawab Moderator : Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)	Clarion Convention Hall B - C <i>Pakaian Dinas Harian</i>	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		08.30-09.30	Presentasi Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Dilanjutkan dengan Tanya Jawab Moderator : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Clarion Convention Hall B - C (Coffee dan Snack disajikan di dalam ruangan)	
		09.30-11.00	Presentasi dari Ketua Global Road Safety Partnership Indonesia (GRSPI) Dilanjutkan dengan Tanya Jawab Moderator : Direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD)	Clarion Convention Hall B - C	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		11.00-13.00	Diskusi Panel : 1. Presentasi dari Direktur LLAJ 2. Presentasi dari Direktur LLASDP 3. Presentasi dari Direktur BSTP 4. Presentasi dari Direktur KTD Dilanjutkan dengan Tanya Jawab Moderator : Sesditjen Hubdat	Clarion Convention Hall B - C	Bidang Acara, Sekretariat, Materi

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
	Selasa 27 Nop '07	13.00-13.15	Pembagian Komisi Sesditjen didampingi Ketua Panitia	Clarion Convention Hall B - C	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		13.15-14.15	ISHOMA	Clarion Convention Hall A	Bidang Konsumsi
		14.15-15.30	Sidang Komisi	Ruang Sidang Komisi	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		15.30-16.00	Rehat Kopi	Ruang Sidang Komisi	Bidang Konsumsi
		16.00-17.30	Lanjutan Sidang Komisi sampai dengan Perumusan Hasil Sidang Komisi	Ruang Sidang Komisi	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		18.30-20.00	Makan Malam	Clarion Convention Hall A	Bidang Konsumsi
		20.00-Selesai	Lanjutan Perumusan Hasil Sidang Komisi	Ruang Sidang Komisi	Bidang Acara, Sekretariat, Materi

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
3.	Rabu 28 Nop'07	06.00-08.00	Makan Pagi	Legend Coffee Shop	Bid. Konsumsi
		08.00-10.00	<p>Sidang Pleno dipimpin oleh Sesditjen Hubdat didampingi oleh Ketua Bidang Materi</p> <p>Laporan Komisi I Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan Laporan Komisi II Bidang Transportasi Perkotaan Laporan Komisi III Bidang LLASDP Sekaligus penyerahan hasil komisi kepada Pimpinan Sidang</p> <p>Laporan Komisi I, II dan III diserahkan kepada Sesditjen Hubdat</p>	<p>Clarion Convention Hall B – C</p> <p><i>Pakaian Dinas Harian</i></p>	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		10.00-10.30	Rehat Kopi	Clarion Convention Hall A	Bidang Konsumsi

No	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN / ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
	Rabu 28 Nop'07	10.30-12.00	Penutupan Rakornis Pembacaan Perumusan Hasil Sidang Bidang Perhubungan Darat oleh Sesditjen Hubdat dilanjutkan penyerahan hasil perumusan kepada Dirjen Hubdat Laporan Ketua Panitia Kesan dan Pesan Peserta Penutupan oleh Dirjen Hubdat Pembacaan Doa	Clarion Convention Hall B - C	Bidang Acara, Sekretariat, Materi
		12.00- Selesai	Makan Siang	Clarion Convention Hall A	

Keterangan

Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan : Clarion Convention Hall B

Komisi II : Bidang Transportasi Perkotaan : Akasia Room

Komisi III : Bidang LLASDP : Clarion Convention Hall C

ORGANISASI PERSIDANGAN

KOMISI I : BIDANG LLAJ DAN KESELAMATAN JALAN

- ◆ Ketua Sidang : Peserta
- ◆ Sekretaris : Ir. Hotma Simanjuntak, MStr.
- ◆ Anggota : Peserta
- ◆ Nara Sumber :
 1. Drs. Suroyo Alimoeso (Direktur LLAJ)
 2. Drs. Suripno, MStr. (Direktur KTD)
 3. Pandu Yuniato, ATD, MEngSc
 4. Gde Pasek Suardika, MSc
- ◆ Notulen :
 1. I Made Suartika, ATD, MEngSc.
 2. Ahmad Yani, ATD, MT
 3. Ahmadi ZB, ATD, MM
 4. Muiz Thohir, ST, MT
- ◆ Perumus :
 1. Pandu Yuniato, ATD, MEngSc.
 2. Gde Pasek Suardika, MSc
 3. I Made Suartika, ATD, MengSc
 4. Ahmad Yani, ATD, MT
 5. Ahmadi ZB, ATD, MM
 6. Muiz Thohir, ST, MT
 7. Perwakilan Peserta
- ◆ Peserta :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NAD
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
 8. Kepala Dinas LLAJ Provinsi Jawa Tengah
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebak
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serang
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pandeglang

16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Subang
17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purworejo
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Semarang
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ciamis
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bekasi
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cianjur
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Garut
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indramayu
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karawang
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuningan
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majalengka
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumedang
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tasikmalaya.
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cirebon
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Demak
34. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tegal
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mojokerto
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamongan
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo
39. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boyolali
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cilacap
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karanganyar
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kebumen
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kendal
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klaten
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magelang
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pati
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pemasang
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rembang
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Grobogan
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Temanggung
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Kidul
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo
62. Kepala Dinas perhubungan Kab. Sleman
63. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
64. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
65. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri
66. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun
67. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
68. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

69. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bondowoso
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gresik
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kediri
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lumajang
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magetan
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Timur
77. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngawi
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pacitan
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pamekasan
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Probolinggo
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sampang
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Situbondo
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumenep
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jombang
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Madiun
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tuban
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangli
96. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa
97. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat Daya
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tengah
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tenggara
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Utara
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bener Meriah
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bireuen
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gayo Lues
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pidie
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simeuleu
114. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asahan
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dairi
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Humbang Hasuduntan
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan

122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pakpak Barat
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai
125. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simalungun
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Selatan
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toba Samosir
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hulu
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuantan Singingi
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pelalawan
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kampar
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Siak
136. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun
137. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Riau
138. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna
139. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lingga
140. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh
141. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawah Lunto
142. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Agam
143. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya
144. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai
145. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota
146. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman
147. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman
148. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
149. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan
150. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok
151. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok
152. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan
153. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sawahlunto Sijunjung
154. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar
155. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muaro Jambi
156. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo
157. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur
158. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat
159. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bungo
160. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
161. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merangin
162. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorolangun
163. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin
164. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih
165. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
166. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Barat
167. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka
168. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Tengah
169. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Selatan
170. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Utara
171. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaur
172. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepahiang
173. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebang
174. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mukomuko

175. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rejang Lebong
176. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seluma
177. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagaralam
178. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
179. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
180. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan
181. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
182. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Utara
183. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah
184. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Timur
185. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan
186. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanggamus
187. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dompus
188. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima
189. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belu
190. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kupang
191. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Landak
192. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Timor Tengah Selatan
193. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Timor Tengah Utara
194. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru
195. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu
196. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maros
197. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pinrang
198. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Konawe
199. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate
200. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majene
201. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamasa
202. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara
203. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar
204. Kepala Balai PLJSKB Bekasi
205. Kepala Balai Diklat Transjaya Tegal
206. Ka. Balai Diklat Transportasi Darat Bali

KOMISI II : BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

- ◆ Ketua Sidang : Peserta
- ◆ Sekretaris : Ir. Jamal Subastian, MSc.
- ◆ Anggota : Peserta
- ◆ Nara Sumber :
 1. DR. Ir. Elly Sinaga, MSc (Direktur BSTP)
 2. Ir. Judiza R.Z, MSc.
 3. M. Yogihartiman, ATD, MSc
 4. R. H. Christiono, MSc.
- ◆ Notulen :
 1. Torang Hutabarat, ATD, MM
 2. Felix Iryantomo, ATD
 3. Sugianto, ATD, MM
- ◆ Perumus :
 1. Torang Hutabarat, ATD, MM
 2. Felix Iryantomo, ATD
 3. Sugianto, ATD, MM
 4. Perwakilan Peserta
- ◆ Peserta :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
 5. Kepala Dinas LLAJ Provinsi Jawa Timur
 6. Kepala Dinas Perhubungan DI. Yogyakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Labuhan Batu
 16. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan
 17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara
 18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi
 19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
 20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
 21. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang
 22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi
 23. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
 24. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
 25. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
 26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batang Hari
 27. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi
 28. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
 29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lahat

30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belitung
32. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang
33. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
34. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung
35. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Blora
38. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
39. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
40. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal
41. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
42. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
43. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Blitar
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buleleng
49. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
50. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram
51. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai
53. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang
54. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak
55. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong
57. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya
58. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
59. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda
60. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tomohon
61. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo
62. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
63. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari
64. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo
65. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar
66. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare
67. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung
68. Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Minahasa
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Utara
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Selatan
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boalemo
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gorontalo
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pahuwato
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bone Bolango
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bombana
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Konawe Selatan
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Donggala
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Parigi Moutong
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buol
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Morowali

83. Kepala Dinas Perhubunagn Kab. Bone
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gowa
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Soppeng
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Tana Toraja
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bima
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara Barat
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Fak fak
90. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
91. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jaya Pura
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manokwari
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jayapura
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merauke
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Enrekang
99. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang
100. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore
101. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Puncak Jaya
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Supiori
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Waropen
105. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai
106. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta
107. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang
108. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
109. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
110. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tangerang
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bekasi
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bogor
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malang
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kertanegara
119. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon
120. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang
121. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar
122. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor
123. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi
124. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
125. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi
126. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sragen
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batang
129. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Badung
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gianyar
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabanan
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis
134. Kepala Pusat Kajian Strategis, Setjen Dephub
135. Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat

136. Ka. Pusdiklat Perhubungan Darat

KOMISI III : BIDANG LLASDP

- ◆ Ketua Sidang : Peserta

- ◆ Sekretaris : Ir. Wiratno, MM
- ◆ Anggota : Peserta

- ◆ Nara Sumber :
 1. Drs. Ahmad Syukri (Direktur LLASDP)
 2. Ir. Amal Hamzah, MSc
 3. Drs. S.Ultra Amiruddin, MM
 4. Ir. Widyatmoko, MSTR
 5. Ir. Tri Yuli Andaru, MM

- ◆ Notulen :
 1. Ir. Fadli Arif, DESS
 2. Suyadi, SH

- ◆ Perumus :
 1. Ir. Amal Hamzah, MSc
 2. Ir. Wiratno, MM
 3. Ir. Tri Yuli Andaru, MM
 4. Ir. Fadli Arif, DESS
 5. Suyadi, SH
 6. Anang Dwi Suryanto
 7. Perwakilan Peserta

- ◆ Peserta :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Riau
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Irian Jaya Barat
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu
 16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir
 17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kampar
 18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Siak
 19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun
 20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Riau
 21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna
 22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lingga
 23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muaro Jambi
 24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo

25. Kepala Dinas Perhubungan Kab Tanjung Jabung
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir
30. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ilir
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Selatan
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jepara
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karangasem
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Barat
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Alor
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ende
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lembata
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngada
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai Barat
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sikka
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Timur
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Barat
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sanggau
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sekadau
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu
63. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
64. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Melawi
65. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pontianak
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sambas
67. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sintang
68. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjar
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Kuala
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Balangan
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Selatan
73. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Baru
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kota Baru

75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapin
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Bumbu
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Utara
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Timur
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Mas
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Katingan
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamandau
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Berau
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulungan
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Barat
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Timur
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasir
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukamara
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seruyan
95. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malinau
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nunukan
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sangihe
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Talaud
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kep.
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Poso
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tojo Una-una
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toli-Toli
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantoeng
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Selayar
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sinjai
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wajo
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buton
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara
116. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-bau
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muna
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu Utara
122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pangkajene Kepulauan
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat

125. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Timur
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Tengah
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sula
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Aru
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara Barat
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat
136. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Fak-fak
137. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong
138. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong Selatan
139. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat
140. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaimana
141. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manokwari
142. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni
143. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Wondama
144. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asmat
145. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Keerom
146. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mimika
147. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yahukimo
148. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor
149. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boven Digoel
150. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mappi
151. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nabire
152. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Painai
153. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarmi
154. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yapen Waroppen
155. Pel. Penyeb. Gorontalo
156. Pel. Penyeb. Kalabahi
157. Pel. Penyeb. Kariangu
158. Pel. Penyeb. Palembang
159. PT. ASDP Dir. Usaha
160. PT ASDP Cab. Bakauheni
161. PT ASDP Cab. Ketapang
162. PT ASDP Cab. Lembar
163. PT ASDP Cab. Kayangan
164. PT ASDP Cab. Balikpapan
165. PT ASDP Cab. Bajoe
166. PT ASDP Cab. Kupang
167. PT ASDP Cab. Palembang
168. PT ASDP Cab. Luwuk
169. Ka. Balai ASDP Palembang
170. PT ASDP Cab. Merak
171. PT ASDP Cab. Surabaya

TIM PERUMUS PLENO RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

- ◆ Ketua : Ir. Hotma P. Simanjuntak, MStr.
- ◆ Sekretaris : Gde Pasek Suardika, MSc
- ◆ Anggota :
 1. Eddy Gunawan, ATD, MEngSc
 2. Ir. Jamal Subastian, MSc.
 3. Ir. Judiza R.Z, MSc.
 4. Ir. Wiratno, MM
 5. Ir. Amal Hamzah, MSc.
 6. Ir. Sugihardjo, M.Si.
 7. Purwatiningsih, SH, MM
 8. Sugianto, ATD, MM
 9. Torang Hutabarat, ATD, MM
 10. Syafrul Amiruddin, SE, MM
 11. Ir. Fadli Arif, DESS
 12. I Made Suartika, ATD, MEngSc.
 13. Ahmad Yani, ATD, MT
 14. Ahmadi, ATD, MM
 15. Muiz Thohir, ST, MT
 16. Suyadi, SH

MODERATOR DAN NOTULEN

PENGARAHAN TEKNIS

- ◆ Pembicara : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- ◆ Moderator : Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
- ◆ Notulen : 1. Muiz Thohir, ST, MT
2. Torang Hutabarat, ATD, MM

PRESENTASI I

- ◆ Pembicara : Direktur Jenderal Otonomi Daerah
- ◆ Moderator : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- ◆ Notulen : 1. I Made Suartika, ATD, MEngSc.
2. Sugianto, ATD, MM

PRESENTASI II

- ◆ Pembicara : Ketua Global Road Safety Partnership Indonesia (GRSPI)
- ◆ Moderator : Direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD)
- ◆ Notulen : 1. Suyadi, SH
2. Ahmad Yani, ATD, MT

DISKUSI PANEL

- ◆ Pembicara : 1. Direktur LLAJ
2. Direktur LLASDP
3. Direktur BSTP
4. Direktur KTD
- ◆ Moderator : Sesditjen Perhubungan Darat
- ◆ Notulen : 1. Ir. Fadli Arif, DESS
2. Ahmadi ZB, ATD,MM

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
SELURUH INDONESIA TAHUN 2007**

I. PENGARAH

- 1. Ketua : Dirjen Perhubungan Darat
- Anggota :
 - 1. Sekretaris Ditjen Hubdat;
 - 2. Direktur LLAJ;
 - 3. Direktur LLASDP;
 - 4. Direktur BSTP;
 - 5. Direktur KTD;
 - 6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan;
 - 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar.

II. PANITIA PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB :

- 1. Ketua :
- 2. WK. Ketua : Drs. Wijianto, MSi.
- 3. Sekretaris : Sigit Irfansyah, MSc.
- 4. Bendahara : Zainal Arifin, SE

A. PANITIA PELAKSANA BID. MATERI, PERSIDANGAN DAN NOTULEN

- 1. Ketua : Ir. Hotma P. Simanjuntak, MStr
- WK. Ketua : Ir. Wiratno, MM
- 2. Sekretaris : I Made Suartika, MSc
- 3. Anggota :
 - 1. Pandu Yunianto, MEng.Sc.
 - 2. Ir. Jamal Subastian, MSc
 - 3. Gede Pasek Suardika, MSc
 - 4. Ir. Amal Hamzah, MSc
 - 5. Drs. Firdaus Rasyad, MM
 - 6. Purwatiningsih, SH, MM
 - 7. Ahmad Yani, ATD, MT
 - 8. Ahmadi ATD, MM
 - 9. Ir. Fadli Arif, DESS
 - 10. Torang Hutabarat, ATD, MSc
 - 11. Suyadi, SH
 - 12. Sugianto, ATD, MM
 - 13. Elrina, ST
 - 14. Anang Dwi Suryanto, SSiT

B. PANITIA PELAKSANA BIDANG ACARA

1. Ketua : R.H. Christiono, MSc
2. Sekretaris : Dra. Sari Catur Lestari
3. Anggota :
 1. Dwi Siwi Setiowati.
 2. Astri Widiani, A.Md. LLAJ, SE.
 3. Ajeng Herdinawati, S.Psi

C. PANITIA PELAKSANA BIDANG TRANSPORTASI

1. Ketua : Abyad Agus Salim, SH
2. Anggota :
 1. Drs. Subroto
 2. Kusnanto Hadi, SE
 3. Hadi Setiabudi P, S.SiT
 4. Drs. Benny Nurdin Yusuf

D. PANITIA PELAKSANA BIDANG PERJALANAN

1. Ketua : Hari Putranto, SE, MT
2. Anggota :
 1. Tri Adi Bagus Wibowo, SE
 2. Paidi
 3. Yosep Yanuar, A.Md. LLAJ

E. PANITIA PELAKSANA BIDANG AKOMODASI DAN KONSUMSI

1. Ketua : Eron Sinaga, SE
2. Anggota :
 1. Irlly Saritini P., ST
 2. Hardiyanto
 3. Mulia PAS
 4. Titik Budiarsih
 5. Hendra Ayi Sonica, SE
 6. Sari Dewi Prasetyaningrum, SE

F. PANITIA PELAKSANA BIDANG SEKRETARIAT DAN PROCEEDING

1. Ketua : Drs. Dede Sudiatna
2. Anggota :
 1. Ni Widaningsih, SE
 2. Sri Hardiyanto, ST
 3. Tofan Muis, SE
 4. Hery Darmanto, A.Md.MI
 5. Darsono
 6. Christanto
 7. Suhendro Wagiono, ST
 8. Yustina Diah Nur Harjanti, A.Md. Keper. (Paramedis)

G. PANITIA PELAKSANA BIDANG HUMAS DAN PELIPUTAN

1. Ketua : Drs. Joko Soelaksono
2. Sekretaris : Pitra Setiawan, S.IP
3. Anggota : Arif Puntoko

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD

ISKANDAR ABUBAKAR

NIP. 120 092 889